

Moeldoko Temukan Ribuan Buruh China di Morowali

Ihsan Dalimunthe, CNN Indonesia | Kamis, 26/04/2018 10:20 WIB



Moeldoko temukan TKA China di Morowali. (CNN Indonesia/Aulia Bintang Pratama)

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengaku telah berkunjung ke Morowali, Sulawesi Tengah untuk memantau pergerakan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia yang belakangan menjadi polemik.

Melalui akun twitter pribadinya, mantan Panglima TNI itu mengakui Morowali termasuk daerah yang disebut-sebut telah 'dibanjiri' TKA China.

"Alhamdulillahirobbilalamin, kemarin saya menyempatkan diri berkunjung ke Morowali. Penasaran dan ingin cek langsung tempat yang dihebohkan memiliki permasalahan dengan tenaga kerja asingnya," kicaunya lewat akun @Dr_Moeldoko, Kamis (26/4).

[View image on Twitter](#)



Dr.H.Moeldoko@Dr_Moeldoko

Alhamdulillahirobbilamin,

kemarin saya menyempatkan diri berkunjung ke morowali.

Penasaran dan ingin cek langsung tempat yang dihebohkan memiliki permasalahan dengan tenaga kerja asingnya. #Moeldoko

[8:56 AM - Apr 26, 2018](#)

Dari hasil pantauan yang dilakukannya Rabu (24/4) itu, Moeldoko mengaku menemukan adanya TKA China. Namun, Moeldoko mengklaim jumlahnya masih lebih sedikit dibandingkan tenaga kerja lokal.

"Ternyata saya dapati dari 13 ribu tenaga kerja di sana, memang 2.000 berasal dari Tiongkok. Tapi sisanya anak negeri Indonesia," kata Moeldoko.



Dr.H.Moeldoko@Dr_Moeldoko

Alhamdulillahirobbilamin,

kemarin saya menyempatkan diri berkunjung ke morowali.

Penasaran dan ingin cek langsung tempat yang dihebohkan memiliki permasalahan dengan tenaga kerja asingnya. #Moeldoko pic.twitter.com/5CJHZdrZa7



Dr.H.Moeldoko@Dr_Moeldoko

Ternyata saya dapati dari 13rb tenaga kerja disana, memang 2000 berasal dari tiongkok tapi sisanya anak negeri Indonesia. #Moeldoko pic.twitter.com/VB8vLDfFoV

[8:56 AM - Apr 26, 2018](#)



Twitter Ads info and privacy

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman [Luhut Binsar Panjaitan](#) mengakui banyaknya TKA China di Morowali menarik perhatian banyak masyarakat.

Namun, setelah ditelusuri olehnya, ternyata tenaga kerja asal China tersebut dipekerjakan untuk mempercepat realisasi investasi fasilitas pemurnian mineral (smelter) di Morowali.

"Saya mengingap di situ, memang ada tenaga kerja asal China. Tapi mereka itu kerja *knock down* supaya cepat jadi. Kami harap, setelah proyek selesai, pekerja asal China di Morowali bisa segera dikurangi," terang Luhut.

Lihat juga:

[Moeldoko Sebut Berita soal 'Serbuan' TKA China Menyesatkan](#)

(DAL)

Moeldoko Sebut Berita soal 'Serbuan' TKA China Menyesatkan

Dika Dania Kardi, CNN Indonesia | Selasa, 24/04/2018 19:59 WIB



Moeldoko menganggap Perpres TKA jadi komoditas pemberitaan yang sangat berkaitan situasi tahun politik. Anggapan TKA didominasi China dicap menyesatkan. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Staf Presiden Moeldoko meminta polemik terkait Peraturan Presiden No. 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) tak diperpanjang. Ia berharap masyarakat dapat memahami utuh isi Perpres dan tak terjebak pada isu yang tak utuh.

Pemerintah menurutnya terus melakukan sosialisasi dan pelurusan informasi terkait

Perpres ini, sehingga tak perlu dibawa ke ranah Pansus DPR, Uji Materi MA maupun menjadi isu utama pada peringatan *May Day* atau Hari Buruh 1 Mei mendatang.

Moeldoko menganggap Perpres TKA telah menjadi komoditas pemberitaan yang erat kaitannya dengan situasi politik saat ini. Dia menepis anggapan yang memberi kesan Indonesia seakan-akan bakal diserbu TKA asal China.

"Yang terjadi di lapangan adalah seolah-olah semua Tenaga Kerja Asing berasal dari China. Ini sungguh berita yang menyesatkan," kata Moeldoko dalam jumpa pers di Bina Graha Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (24/4) seperti dikutip dari situs KSP.

Lihat juga:

[Yusril Sebut Rezim Jokowi Tunduk pada China soal TKA](#)

Moeldoko menegaskan tidak benar TKA asing menggeser tenaga kerja Indonesia.

"Buktinya malah terjadi penurunan jumlah TKA di Indonesia," kata Moeldoko yang juga menyatakan bahwa tenaga kerja Indonesia pun membanjiri pasar internasional.



Moeldoko. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)

Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyatakan Perpres TKA lebih mengatur penyederhanaan prosedur perizinan, dan mempercepat layanan izin TKA.

"Tujuan dari lahirnya Perpres ini diharapkan memberikan kepastian terhadap investor, agar tidak menghambat investasi masuk ke Indonesia," kata Hanif.

Ia menekankan, investasi merupakan hal yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan.

Hanif pun menegaskan Perprest tersebut hanya mengatur kemudahan pada sisi prosedur dan birokrasi masuknya TKA, bukan membebaskannya sama sekali.

"Kalau ada didapati pekerja asing bekerja sebagai buruh kasar ya itu pelanggaran. Pelanggaran ya pasti ditindak," tegasnya.

Lihat juga:

[May Day, Buruh Deklarasi Capres, Prabowo Jadi Unggulan](#)

Hanya saja ia menekankan, agar pelanggaran-pelanggaran itu tidak digeneralisasi.

"Perlakukan kasus sebagai kasus. Karena kita juga tak ingin apa yang terjadi pada TKI kita digeneralisir," ungkapnya

Selain itu, Hanif memaparkan selama tiga tahun pemerintahan Presiden Jokowi ini, lapangan pekerjaan sudah bertambah cukup signifikan. Dalam Pilpres 2014 silam, Jokowi menjanjikan 10 juta lapangan pekerjaan selama 5 tahun.

"Data yang ada di kami menyebutkan bahwa pada 2014 ada 2,6 juta lapangan kerja, kemudian pada 2015 ada 2,8 juta, pada 2016 ada 2,4 juta, dan pada 2017 sebanyak 2,6 juta. Artinya kan sudah melampaui janji kampanye," kata dia.



Yusril Ihza Mahendra. (CNN Indonesia/Artho Viando)

Lihat juga:

[Yusril Bantu Serikat Pekerja Uji Materi Perpres TKA ke MA](#)

Perpres TKA telah menuai kritik sejumlah pihak. Advokat Yusril Ihza Mahendra menilai Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla lebih suka menuruti kemauan China demi kelancaran investasi di Indonesia daripada kepentingan rakyatnya.

Menurut Yusril, salah satu syarat agar China mau berinvestasi di Indonesia adalah dengan menuruti kemauan negara tirai bambu tersebut. Salah satunya yakni memberikan ruang bagi tenaga kerja asal China untuk bekerja di Indonesia.

Yusril menilai motif Perpres tersebut diterbitkan bukan untuk mengatur masalah ketenagakerjaan.

"Jadi motif pemerintah sebenarnya menerbitkan perpres itu bukan untuk pengaturan masalah tenaga kerjanya, Tetapi malah pertimbangan investasinya kepada pihak China," tutur Yusril di kantornya, bilangan Kasablanka, Jakarta. **(gil/asa)**